



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pengantar

Pada bab II berisi tentang telaah pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dalam bab ini khususnya menyajikan bagaimana model teoritikal, hipotesis, dan model empirik terbentuk. Model teoritikal yang dimaksud adalah dasar yang dibuat untuk mengembangkan hipotesis dalam menjawab masalah penelitian yang disebut sebagai model empirik. Variabel-variabel penelitian diilustrasikan sedemikian rupa agar dapat menggambarkan dengan jelas hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami persoalan yang terjadi yang akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, model ini akan menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang dicapai.

B. Telaah Pustaka

1. Definisi Perpajakan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh Pemerintah (fiskus) berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang-barang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak memiliki beberapa definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi saja, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mewakili Eropa, definisi almarhum Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang mewakili Indonesia dan Sommerfeld dkk yang mewakili Amerika Serikat (Mohammad Zain, 2005:10). Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. (1990: 5), pajak adalah

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., pajak adalah

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

- d. Definisi pajak dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fiskus sebagai pengumpul (pemungut) pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulatif).

Fungsi pajak antara lain :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Definisi Pajak Penghasilan (Badan)

Berdasarkan komposisi sumber penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah, pajak penghasilan menduduki peringkat pertama dengan jumlah penerimaan terbesar. Di Indonesia berlaku undang-undang perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Definisi dari wajib pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Objek pajak PPh badan adalah penghasilan. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti yang diatur dalam undang-undang pajak atas bunga, dividen dan royalti tahun 1970. Hingga saat ini undang-undang PPh ini telah mengalami perubahan pada tahun 1990, 1994, 2000, dan yang terakhir dilakukan pada tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembayaran negara dan pembangunan nasional.

Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam era globalisasi saat ini dimana pertumbuhan ekonomi semakin pesat terutama di negara berkembang seperti halnya Indonesia, diperlukan adanya perubahan undang-undang pajak penghasilan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Perubahan undang-undang pajak penghasilan dimaksudkan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self-assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan ini adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Dalam UU No. 17 tahun 2000, tarif pajak penghasilan terdiri dari 3 lapisan yaitu 10%, 15%, dan 30% kemudian dirubah menjadi tarif tunggal berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 17 yaitu 28% yang berlaku efektif pada tahun 2009 (Pasal 17 ayat 1 huruf b) dan 25% yang berlaku efektif pada tahun 2010 (Pasal 17 ayat 2a). Dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b disebutkan pula bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penurunan tarif pajak ini menjadi suatu insentif bagi perusahaan dalam meringankan pembayaran beban pajak. Diduga dengan adanya keringanan pajak ini menjadi kesempatan emas bagi manajemen dalam upaya meminimalkan pajak pada tahun pajak sebelum diberlakukannya tarif yang baru dengan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya sehingga laba menjadi rendah. Dengan kata lain, manajer cenderung berperilaku konservatif.

Perubahan tarif yang berlaku dari tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tarif Pasal 17

Tahun	Tarif Pasal 17 ayat 2a	Tarif Pasal 17 ayat 2b
2008	Maksimal 30%	Maksimal 25%
2009	28%	23%
2010	25%	20%

Sumber: UU No. 17 Tahun 2000

Untuk tahun pajak 2008, perhitungan PPh masih menggunakan tarif progresif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%



Di atas Rp 100.000.000,00	30%
---------------------------	-----

Sumber: UU No. 17 Tahun 2000

Dengan adanya insentif pajak sebesar 5% maka tarif yang digunakan oleh pengguna insentif pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tarif Penghasilan Kena Pajak dengan Insentif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	25%

Sumber: UU No. 17 Tahun 2000

3. Keterkaitan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Membicarakan masalah perbedaan laporan keuangan komersial (akuntansi) dengan laporan keuangan fiskal, sama halnya dengan membicarakan masalah akuntansi pajak. Akuntansi pajak umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan suatu biaya diakui sebagai pengurangan dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya tergantung kepada tahun pajak atau tahun buku wajib pajak, metode akuntansi yang digunakan dan doktrin serta konsep yang menjadi acuannya. Laporan keuangan menjadi suatu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam prakteknya, cenderung terjadi perbedaan kepentingan dari para pengguna laporan keuangan tersebut yang menyebabkan ketidaksamaan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut maka prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan (Mohammad Zain, 2005:116).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan komersial (akuntansi) dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya. Perbedaan penggunaan standar dalam penyusunan laporan keuangan terutama laporan laba rugi akan mengakibatkan timbulnya perbedaan perhitungan dari wajib pajak, yang akan berakibat adanya perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Misalnya saja dalam perhitungan metode persediaan secara akuntansi masih boleh menggunakan metode LIFO namun secara perpajakan tidak. Perbedaan metode akuntansi persediaan yang diterapkan dalam perusahaan akan mempengaruhi nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih perusahaan. Dalam kondisi harga yang semakin meningkat (inflasi), metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah sehingga laba bersih menjadi tinggi. Sebaliknya, metode LIFO akan menghasilkan persediaan akhir yang rendah, harga pokok penjualan yang tinggi, dan laba bersih yang rendah. Metode rata-rata tertimbang akan menghasilkan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih yang nilainya berada di antara metode FIFO dan metode LIFO. Oleh karena itu, adanya perbedaan penggunaan metode akuntansi persediaan dalam laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda juga. Salah satu tujuan perusahaan menerapkan metode LIFO

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



adalah adanya keuntungan pajak karena memperkecil laba (kemungkinan dalam menghemat pajak). Bila melihat kelebihan metode LIFO seharusnya banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan metode LIFO. Namun adanya peraturan perpajakan tentang pajak penghasilan tidak memperbolehkan penggunaan metode LIFO, walaupun PSAK No. 14 memperbolehkan penggunaan metode LIFO. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia enggan menggunakan metode LIFO karena jika menggunakan metode LIFO, perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan yang berbeda untuk tujuan pajak dan komersil. Dengan adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan PSAK No. 14 maka metode rata-rata tertimbang menjadi solusi bagi perusahaan *go public* untuk menghasilkan laba yang relatif stabil pada kondisi harga yang berubah atau inflasi (Wiryadi dan Supatmi, 2009).

Seperti halnya dengan metode persediaan, juga terdapat perbedaan dalam metode penyusutan. Menurut akuntansi komersial, diperbolehkan memilih metode penyusutan seperti *straight line method*, *sum of the years digits method*, *declining balance method*, *double declining balance method*, dan lain-lain. Menurut perpajakan, wajib pajak diperbolehkan untuk memilih salah satu metode untuk menghitung penyusutan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Metode garis lurus digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud sedangkan untuk kelompok harta berwujud selain bangunan terdapat dua alternatif metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang sama halnya juga diterapkan untuk perhitungan amortisasi. Penggunaan salah satu metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan taat asas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode penyusutan semakin panjang maka semakin tidak konservatif. Hal tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Di antara metode penyusutan yang disebutkan, metode penyusutan saldo menurun lebih konservatif dibanding metode lainnya. Tetapi hal tersebut hanya terjadi pada awal-awal periode penyusutan sedangkan pada saat menuju akhir periode penyusutan, metode saldo menurun menjadi tidak konservatif.

Jika terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal), maka wajib pajak melakukan perhitungan rekonsiliasi pajak dalam menyesuaikan pelaporan keuangan wajib pajak badan dari ketentuan komersial menjadi menurut ketentuan perpajakan (fiskal). Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laba/rugi menurut SPT tahunan (perpajakan). Untuk melakukan perhitungan PPh badan, harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi meliputi pendapatan dan biaya.

Menurut Guenther et al (1997) dalam Jamaluddin (2011) terdapat kesamaan dalam pengukuran laba akuntansi dan laba fiskal yaitu metoda akuntansi akrual. Meskipun terdapat beberapa butir spesifik dari pendapatan dan biaya harus mengikuti peraturan akuntansi fiskal yang berbeda dengan peraturan akuntansi keuangan, misalnya pembebanan biaya depresiasi aset

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap. Kaitan antara pelaporan pajak dan komersial dapat menyebabkan konservatisme dalam laporan keuangan. Pengakuan asimetrik keuntungan dan kerugian dalam konservatisme akuntansi membuat manajer perusahaan profitabel mengurangi nilai kini pajaknya dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, menunda pengakuan dari penghasilan dan mempercepat pengakuan dari biaya dapat menunda pembayaran pajaknya.

Shackleford dan Shevlin (2001) dalam Qiang (2007) menyatakan mengenai hubungan antara nilai buku (akuntansi) dengan nilai fiskal (pajak). Hubungan pertama, strategi pengurangan pajak seringkali mengakibatkan laba buku (akuntansi) yang lebih rendah karena penyesuaian laba buku dan laba pajak. Hubungan kedua, perbedaan yang besar antara laba buku dan laba pajak membuat perusahaan cenderung untuk melakukan konservatisme agar laba buku menjadi rendah untuk mengurangi laba kena pajak.

Dalam perencanaan pajak (*tax planning*), biasanya perusahaan menempuh strategi meminimalkan pajak (*tax-minimizing*) dengan laba dilaporkan lebih rendah. Secara umum, *tax planning* ini dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Pemilihan metoda akuntansi, pendanaan, pemasaran, produksi dan fungsi bisnis lainnya, cenderung merendahkan laba fiskal. Walaupun akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan kadang berbeda dalam pengakuan penghasilan dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perhatian penting lainnya, merencanakan pajak penghasilan menghasilkan laba akuntansi lebih rendah. Pengelolaan akuntansi keuangan dan pengelolaan pajak adalah tidak independen dan tidak terdapat pertimbangan secara konsisten mendominasi dalam pengambilan keputusannya.

4. Konservatisme

a. Definisi Konservatisme

- (1) Menurut FASB Statement of Concept No. 2 dalam Sari (2004) konservatisme adalah reaksi hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan.
- (2) Menurut Basu (1997) konservatisme dalam (Dewi, 2003: 508) merupakan praktik akuntansi dengan mengurangi laba (dan menurunkan nilai aktiva bersih) dalam merespons berita buruk (*bad news*) tetapi tidak meningkatkan laba (dan menaikkan nilai aktiva bersih) dalam merespons berita baik (*good news*).
- (3) Menurut Suwardjono (2006: 244) konservatisme adalah sikap atau aliran (*mazhab*) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terburuk dari ketidakpastian tersebut.
- (4) Menurut Belkaoui (2006) dalam Astarini (2011 :16) konservatisme merupakan prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan untuk penyajian data akuntansi yang relevan dan *reliable*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih di antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. Secara lebih spesifik, prinsip ini menunjukkan bahwa lebih disukai melaporkan nilai terendah untuk aset dan *revenue* dan nilai tertinggi untuk utang dan *expense*.

(5) Menurut Wolk *et al.* (2001: 144-145) dalam Lo (2005: 397) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai usaha untuk memilih metoda akuntansi berterima umum yang:

- (a) Memperlambat pengakuan *revenues*
- (b) Mempercepat pengakuan *expenses*
- (c) Merendahkan penilaian aktiva
- (d) Meninggikan penilaian utang

Akuntansi konservatisme memberikan batasan bagi manager dalam pergerakannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga dengan penerapan akuntansi yang konservatif diharapkan investor dapat meminimalisasi resiko yang terjadi akibat adanya informasi yang asimetris. Walaupun terjadi pertentangan di antara para peneliti dalam menilai kebermanfaatan dari konservatisme akuntansi, praktek penerapan konservatisme dalam akuntansi masih saja terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini memperlihatkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki suatu nilai kebermanfaatan bagi kalangan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan walau dalam kenyataannya menimbulkan



kontroversi dan permasalahan tersendiri khususnya dalam hal perpajakan. Salah satu contohnya adalah dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan sehingga menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah.

b. Kontroversi Kebermanfaatan Konservatisme

Dalam kenyataannya konservatisme sendiri merupakan konsep akuntansi yang kontroversial dimana terdapat pro dan kontra seputar penerapan prinsip konservatisme.

1) Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Banyak kritik mengenai kegunaan suatu laporan keuangan jika penyusunannya dengan menggunakan metode yang sangat konservatif. Para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini menyebabkan laporan keuangan menjadi bias (tidak mencerminkan realita) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko keuangan. Pendapat ini dipicu oleh definisi akuntansi yang mengakui biaya dan kerugian lebih cepat, mengakui pendapatan dan keuntungan lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, dan kewajiban dengan nilai tertinggi (Basu, 1997: 7-8).

Konservatisme menurut Penman dan Zhang (2002) dapat menurunkan kualitas dari labanya yaitu ketika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan mempraktikkan konservatisme kemudian menurunkan jumlah investasinya, maka perusahaan tersebut melakukan realisasi cadangan. Hal tersebut bukan merupakan indikator yang baik untuk laba mendatang karena pada periode tersebut laba meningkat. Sedangkan pada perusahaan yang mempraktikkan konservatisme dan mengalami pertumbuhan dalam investasi akan menurunkan laba dilaporkan dan menciptakan cadangan. Dalam kaitan pajak penghasilan, hal ini diduga dapat mengarahkan terjadinya sengketa karena menyebabkan semakin besar perbedaan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dan perhitungan menurut fiskal.

Menurut Dahlia Sari (2004: 1046) menyatakan bahwa prinsip konservatisme menyebabkan laba dan aktiva menjadi rendah tetapi akan membuat laba dan aktiva menjadi tinggi di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa laba dan aktiva akan menjadi tidak konservatif di masa mendatang.

2) Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Para pendukung konservatisme seperti halnya Mayangsari dan Wilopo (2002) menyatakan bahwa secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena bisa digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Demikian pula dengan Feltham dan Ohlson dan Watts dalam Dwi (2007)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menyatakan bahwa penelitian mereka membuktikan laba dan aktiva yang dihitung dengan akuntansi konservatif dapat meningkatkan kualitas laba sehingga dapat digunakan untuk menilai perusahaan.

Pada perusahaan yang menggunakan prinsip konservatisme terdapat cadangan tersembunyi yang digunakan untuk investasi sehingga perusahaan yang konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh (Mayangsari dan Wilopo, 2002: 294). Pertumbuhan ini akan direspon positif oleh pasar sehingga nilai perusahaan yang konservatif akan lebih besar dari nilai bukunya. Pasar menilai positif investasi yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus kas di masa depan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat konservatisme yang diterapkan perusahaan maka semakin tinggi nilai pasar perusahaan.

Terjadinya peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global disebabkan meningkatnya tuntutan hukum sehingga audit dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif dalam laporan keuangan (Givoly dan Hayn, 2000: 288). Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan asimetri informasi dalam mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham (konflik agen) (Ahmed, *et al* ,2002: 868).



Konservatisme dapat mengurangi biaya utang perusahaan dan membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstated*. Dengan demikian kebermanfaatan peranan konservatisme akuntansi bagi perusahaan terbukti karena hingga saat ini akuntansi konservatif masih tetap digunakan dengan adanya peningkatan penggunaan konservatisme secara global.

c. Hubungan Konservatisme dengan Pemilihan Metode Akuntansi

Laporan keuangan merupakan hasil (*output*) dari suatu siklus akuntansi. Laporan tersebut digunakan oleh pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan dan mengambil keputusan. Laporan keuangan harus memenuhi tujuan, aturan, serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan isinya serta bermanfaat bagi penggunanya. Di Indonesia berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibentuk oleh badan yang berwenang dalam rangka menetapkan standar akuntansi bagi penyusunan laporan keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2002) dalam Widayati (2011) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang berkualitas adalah terbebas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari rekayasa dan menyajikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta agar tidak merugikan pihak-pihak yang menggunakannya. Hal ini didukung dengan pernyataan dari *Financial Accounting Standard Board (FASB)* dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC No. 2)* yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif suatu informasi yang utama adalah kualitas relevansi dan keandalan. Keandalan suatu informasi dinilai dari bebas dari kesalahan, penyimpangan dan disajikan secara jujur. Keandalan diperlukan oleh pengguna yang tidak memiliki cukup waktu dan keahlian untuk memeriksa isi sebenarnya dari informasi laporan keuangan.

Dalam SAK terdapat beberapa pilihan prosedur akuntansi yang dapat digunakan perusahaan dan dibebaskan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif metode maupun estimasi akuntansi yang tersedia sesuai kondisi perusahaan atau yang dikenal sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Kecenderungan pemilihan dari beberapa alternatif ini dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Akibatnya, terjadinya peningkatan penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai laba yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Praktek seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang dilaporkan (Gideon, 2005: 176).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Lo (2005: 397) bahwa SAK tidak konsisten dalam memilih tingkat konservatisme akuntansi. Karakteristik kualitatif pertimbangan sehat dalam SAK menunjukkan kecenderungan memilih akuntansi netral, bukan akuntansi konservatif maupun akuntansi liberal. Akan tetapi, SAK cenderung pada akuntansi konservatif dalam beberapa PSAK (IAI, 2004), yaitu:

- (1) PSAK No. 57 (Revisi 2000): Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontijensi memperkenalkan perusahaan mengakui kewajiban diestimasi di neraca tetapi tidak memberikan peluang pengakuan kemungkinan adanya “aktiva diestimasi”
- (2) PSAK No. 13 (1994): Akuntansi untuk Investasi, paragraf 38 menyatakan investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai terendah antara biaya dan nilai pasar
- (3) PSAK No. 14 (1994): Persediaan, paragraf 38 menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasian bersih mana yang lebih rendah
- (4) PSAK No. 19 (Revisi 2000): Aktiva Tidak Berwujud, paragraf 36 menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu proyek intern). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada suatu proyek intern) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Paragraf 39 menyatakan suatu aktiva tidak berwujud

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern) diakui jika, dan hanya jika, perusahaan dapat memenuhi enam kriteria tertentu

(5) PSAK No. 48 (1998): Penurunan Nilai Aktiva, paragraf 41 menyatakan jika nilai yang diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

SAK masih memberikan peluang bagi manajer perusahaan untuk menyelenggarakan akuntansi liberal atau konservatif dalam beberapa PSAK (IAI, 2004) yaitu:

- (1) PSAK No. 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan tidak mengatur ketentuan mengenai taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, padahal terdapat beberapa cara estimasi kerugian piutang
- (2) PSAK No. 13 (1994): Akuntansi untuk Investasi, paragraf 38 menyatakan bahwa biaya (*cost*) dapat ditentukan berdasarkan FIFO, rata-rata tertimbang, atau LIFO. Nilai pasar dapat ditentukan berdasarkan portofolio agregat, dalam total atau menurut urutan kategori investasi, atau investasi individual, secara konsisten

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (3) PSAK No. 14 (1994): Persediaan, paragraf 41 menyatakan bahwa biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya FIFO, rata-rata tertimbang, atau LIFO
- (4) PSAK No. 16 (1994): Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, paragraf 33 menjelaskan bahwa masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh perusahaan. Paragraf 51 menjelaskan bahwa pemilihan metoda penyusutan dan estimasi masa manfaat aktiva adalah masalah pertimbangan
- (5) PSAK No. 17 (1994): Akuntansi Penyusutan, paragraf 5 menjelaskan bahwa estimasi masa manfaat suatu aktiva yang dapat disusut atau suatu kelompok aktiva serupa yang dapat disusut adalah suatu masalah pertimbangan yang biasanya berdasarkan pengalaman dengan jenis aktiva serupa. Paragraf 15 menyatakan bahwa masa manfaat suatu aktiva yang dapat disusut harus diestimasi setelah mempertimbangkan faktor taksiran aus dan kerusakan fisik, keusangan, dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktiva
- (6) PSAK No. 19 (Revisi 2000): Aktiva Tidak Berwujud, paragraf 58 menyatakan bahwa jumlah yang diamortisasi dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva



siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aktiva siap untuk digunakan. Dengan demikian, manajer mempunyai peluang untuk memilih menyelenggarakan akuntansi liberal atau konservatif, yaitu pada:

- (a) Cara estimasi piutang yang tidak dapat ditagih (PSAK No. 1 Revisi tahun 1998)
- (b) Asumsi aliran biaya (*cost*) investasi jangka pendek (PSAK No. 13 tahun 1994)
- (c) Asumsi aliran biaya (*cost*) persediaan (PSAK No. 14 tahun 1994)
- (d) Estimasi masa manfaat ekonomi aktiva tetap (PSAK No. 16 tahun 1994, PSAK No. 17 tahun 1994, dan PSAK No. 19 Revisi tahun 2000)

Dewi (2004) dalam Widayati (2011) menyatakan bahwa metoda yang paling konservatif dalam penilaian persediaan adalah metode LIFO (asumsi perekonomian dalam keadaan inflasi) sedangkan yang paling optimis atau liberal adalah metode FIFO. Kedua metode tersebut akan menghasilkan laba yang berbeda. Penerapan metode LIFO akan menghasilkan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO (dalam keadaan inflasi). Dalam metode penyusutan atau amortisasi untuk aset tetap atau aset tidak berwujud akan lebih konservatif jika periode penyusutan semakin pendek dan semakin optimis jika periode penyusutan semakin panjang. Metode penyusutan *double declining balance* relatif lebih konservatif dibanding metode garis lurus karena menghasilkan kos

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang lebih tinggi sehingga laba menjadi relatif kecil. Standar akuntansi mengenai pengakuan biaya riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang lebih sesuai dengan keadaan perusahaan. Jika kos diakui dalam periode berjalan, maka perusahaan menghasilkan laporan yang cenderung konservatif. Biaya riset yang dicatat sebagai kos pada periode berjalan menyebutkan kos menjadi semakin tinggi sehingga laba yang dihasilkan kecil.

Menurut Watts (2003a) dalam Widayati (2011: 17) bahwa pengabaian konservatisme akuntansi dalam penyusunan standar akan mengakibatkan standar yang dihasilkan berdampak buruk bagi pelaporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan penginterpretasian pihak-pihak yang berkepentingan menjadi tidak tepat dan bertentangan pula dengan tujuan pengungkapan semua informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang dilaporkan harus sesuai standar yang berkualitas yaitu terbebas dari rekayasa dan menyajikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta agar tidak merugikan pihak yang menggunakannya.

5. Teori Agensi

Teori agensi merupakan basis teori yang memegang peranan penting dan mendasari praktik bisnis perusahaan saat ini. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* selaku pemegang saham dan *agent* selaku manajer. *Principal* mengontrak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agent untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dengan menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. *Agent* berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. *Principal* memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas tugas yang telah dibebankan kepada *agent* (Widayati, 2011). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Pendefinisian teori agensi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976).

Dalam praktiknya di perusahaan ternyata *agent* dalam aktifitasnya kadangkala tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dari awal untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham melainkan cenderung untuk kepentingan sendiri, sehingga muncul suatu konflik yang dikenal dengan konflik keagenan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Widyaningdyah (2001: 91) dalam Resti (2012: 10) yaitu teori agensi memiliki asumsi dimana masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan probabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.

Dalam hal ini, terjadi ketidakseimbangan informasi dimana *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan *principal* sehingga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi. Menurut Scott (2009 :8) dalam Oktomegah (2012: 37) dan Qomariyah, et al. (2007) dalam Deviyanti (2012: 16) terdapat 2 (dua) macam asimetri informasi, yaitu:

a. *Adverse selection*

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena para manajer dan pihak internal lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan atau informasi tentang keadaan atau kondisi kini dan prospek perusahaan ke depan dibandingkan dengan para pemegang saham. Para pemegang saham atau *principal* mungkin tidak mengakses semua informasi yang disediakan oleh *agent* sehingga tidak dapat mengawasi tindakan manajer apakah mereka sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau tidak. Kemungkinan lainnya adalah manajer dengan sengaja menyembunyikan atau memanipulasi informasi-informasi penting yang akan diberikan oleh *principal* sehingga *principal* sulit untuk melakukan keputusan investasi. Dengan kata lain, informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Moral hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana suatu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham sebagai *principal* maupun pihak lainnya seperti kreditur tidak mengetahui tindakan manajer sebagai *agent* yang mungkin melakukan tindakan di luar kontrak kerja yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku atau tindakan manajer yang mungkin bekerja kurang optimal bagi tercapainya tujuan perusahaan.

Pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari kepentingan manajer untuk mengoptimalkan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Mayangsari dan Wilopo (2002) mengatakan bahwa dukungan manajemen terhadap konservatisme diduga berkaitan dengan motivasi ini. Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Deviyanti (2012: 17-18) menyatakan bahwa untuk menangani masalah-masalah keagenan seperti perbedaan tujuan dan asimetri informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara pemantauan. Masalah keagenan dapat diminimumkan dengan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pemegang saham sebagai *principal* dapat membuat suatu sistem pengendalian yang dapat memantau tindakan manajer yang mungkin akan melanggar kontrak yang telah ditetapkan seperti mendahulukan kepentingan manajer guna memaksimumkan kekayaan pribadi sebelum memberikan manfaat kepada *principal*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Teori *Signaling*

Teori *signaling* menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Dalam praktiknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi konservatif dengan menghitung depresiasi lebih tinggi akan menghasilkan laba rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara pada penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang. Tujuan teori *signaling* kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek perusahaan masa datang. Oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan diinformasikan kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainnya. *Understatement* laba dan aktiva bersih yang relatif permanen yang ditunjukkan melalui laporan keuangan merupakan suatu sinyal positif dari manajemen kepada investor bahwa manajemen telah menerapkan akuntansi konservatif untuk menghasilkan laba yang berkualitas. Investor diharapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat menerima sinyal ini dan menilai perusahaan dengan lebih tinggi (Nugroho: 2012).

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi nonakuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.

7. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Teori ini didasarkan pada bagian bahwa pemegang saham berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka dan manajer secara langsung terkait dengan kemakmuran mereka. Teori akuntansi positif menurut Chariri dan Ghozali (2007) dalam Deviyanti (2012: 17-18) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan yaitu:

a. Hubungan manajemen dengan pemilik (pemegang saham)

Manajemen akan cenderung menerapkan akuntansi yang kurang konservatif atau optimis apabila kepemilikan saham yang ada di perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan saham pemegang saham eksternal. *Agent* atau manajer tersebut ingin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

agar kinerjanya dinilai bagus dan mendapatkan bonus (adanya asumsi *bonus plan*) maka manajer cenderung meningkatkan laba periode berjalan. Namun, *principal* atau pemegang saham hanya menginginkan dividen maupun *capital gain* dari saham yang dimilikinya. Sebaliknya, jika kepemilikan manajer lebih tinggi dibanding pemegang saham eksternal maka manajemen cenderung melaporkan laba yang lebih konservatif. Adanya rasa memiliki dari manajer terhadap perusahaan yang tinggi membuat manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Penerapan akuntansi yang konservatif menyebabkan terdapat cadangan dana tersembunyi yang cukup besar untuk dapat meningkatkan investasi perusahaan. Aset akan diakui dengan nilai terendah sehingga nilai pasar lebih besar daripada nilai buku dan terbentuklah *goodwill*.

b. Hubungan manajemen dengan kreditor

Apabila rasio utang atau ekuitas perusahaan tinggi maka kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau yang cenderung menurunkan laba akan semakin besar. Hal ini dikarenakan kreditor dapat mengawasi kegiatan operasional manajemen sehingga pihaknya meminta manajemen agar melaporkan laba yang konservatif demi keamanan dananya.

c. Hubungan manajemen dengan pemerintah

Manajer akan cenderung melaporkan labanya secara konservatif atau secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas, dan masyarakat. Perusahaan yang besar akan lebih disoroti oleh pihak-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak tersebut dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar harus dapat menyediakan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih baik kepada masyarakat sebagai tuntutan dari pemerintah dan juga membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan laba perusahaan yang tinggi.

8. Insentif Pajak dan Konservatisme

Dalam suatu perusahaan, perbedaan kepentingan seringkali terjadi antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan, yang merupakan para pengguna laporan keuangan, yaitu pertentangan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemerintah (fiskus). Di satu sisi, pihak manajemen menginginkan membayar pajak dengan nilai yang sekecil mungkin namun di sisi lain pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan pajak yang sebesar mungkin sebagai pendapatan pemerintah yang wajib disetor ke negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai hubungan antara perpajakan dan konservatisme masih jarang ditemui. Bahkan menurut Lo (2005) penelitian konservatisme yang menggunakan penjelasan perpajakan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, hingga saat ini masih sulit ditemui teori-teori yang menjelaskan hubungan antara perpajakan dengan konservatisme akuntansi secara menyeluruh atau komprehensif. Watts (2003: 209-210) menyatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong dalam penggunaan konservatisme akuntansi, yaitu kontrak, tuntutan hukum (*litigation*), perpajakan (*taxation*), dan peraturan (*regulation*). Dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungannya dengan pajak, faktor yang mendorong terjadinya konservatisme akuntansi adalah adanya insentif untuk menunda pembayaran pajak. Perusahaan dapat memilih metode-metode yang cenderung konservatif dalam rangka menekan biaya pajak sepanjang diperbolehkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Di Indonesia peraturan perpajakan mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal dengan tujuan mencocokkan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Ada peraturan yang diperbolehkan secara akuntansi namun yang tidak diperbolehkan dalam perpajakan. Meskipun demikian, aspek perpajakan tetap menjadi pertimbangan pilihan perusahaan untuk menerapkan akuntansi konservatif. Regulator membuat serangkaian insentif bagi pelaporan keuangan agar laporan keuangan disusun secara konservatif. Negara-negara dengan regulasi tinggi memiliki tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan tingkat regulator rendah.

Perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan melakukan konservatisme akuntansi. Guenther et al (1997) dalam Wicaksono (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan pajak penghasilannya. Metoda-metoda untuk menghitung laba kena pajak sangat berkaitan dengan perhitungan laba dalam laporan keuangan. Manajer berusaha menemukan cara untuk mengelola baik laba yang dilaporkan di laporan keuangan dan laba untuk pembayaran pajak berjalannya dalam menghadapi *trade-off* untuk mencapai dua tujuan yang bersifat *mutually exclusive*, yaitu memaksimalkan laba akuntansi dengan meminimalkan pembayaran pajak. Sepanjang perusahaan memperoleh laba, mempunyai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba kena pajak, dan tarif pajaknya positif maka hubungan antara laba yang dilaporkan dengan laba kena pajak mendorong insentif untuk menanggukkan laba untuk mengurangi nilai sekarang dari pajak.

Jamaluddin (2011) mengemukakan bahwa dalam kaitan antara perpajakan dan pelaporan keuangan dapat juga menyebabkan konservatisme dalam pelaporan keuangan. Pengakuan asimetrik dari penghasilan/keuntungan dan biaya/kerugian membuat manajer perusahaan mengurangi nilai pajaknya dan meningkatkan nilai perusahaan. Menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya dapat menurunkan besar laba kena pajak sehingga dapat menunda pembayaran pajak. Diduga konservatisme akuntansi dengan pengakuan asimetriknya tersebut dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dengan fiskus yang diakibatkan karena fiskus menganggap penetapan besar pajak penghasilan menurut perusahaan terlalu rendah disebabkan konservatisme akuntansi yang menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung lebih rendah serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Setelah dilakukan pengecekan perhitungan oleh fiskus, hal ini dapat menimbulkan perusahaan menjadi kurang bayar dan selanjutnya dapat menjadi awal dari timbulnya sengketa pajak penghasilan.

Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah tarif progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Pada tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang pajak penghasilan yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku efektif tahun 2009. Undang-undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut memberikan insentif dan kemudahan untuk wajib pajak. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. Salah satu insentif tersebut adalah penurunan tarif pajak dimana tarif pajak badan mengalami penurunan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu (1) pada tahun 2009 menggunakan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 menggunakan tarif sebesar 25%, (2) 5% dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penurunan tarif pajak ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

Perubahan tarif pajak dari tarif progresif menjadi tarif tunggal memberikan dampak tersendiri bagi perusahaan. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk melakukan konservatisme yang tinggi. Biasanya perusahaan menempuh strategi meminimalkan pajak (*tax-minimizing*) dengan laba dilaporkan lebih rendah. Pemilihan metoda akuntansi, pendanaan, pemasaran, produksi dan fungsi bisnis lainnya, cenderung merendahkan laba fiskal. Walaupun akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan terkadang berbeda dalam pengakuan penghasilan dan perhatian penting lainnya, merencanakan pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghasilan, dan menghasilkan laba akuntansi lebih rendah (Shackelford dan Shevlin,2001 dalam Wicaksono,2012).

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang tetapi tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Oleh karena itu, banyak wajib pajak baik pribadi maupun badan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan *tax planning*. Secara umum, *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan *tax planning* antara lain menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan, menunda pengakuan penghasilan, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah selain penghematan kas keluar karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi juga dapat mengatur aliran kas karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Umumnya *tax planning* banyak diterapkan oleh wajib pajak badan, dalam hal ini badan usaha yang besar dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya. Beberapa strategi atau cara tertentu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dianggap legal atau sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Mangoting, 1999: 45-47).

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa perpajakan memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan konservatisme akuntansi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2011) dan Resti (2012). Adanya motif terselubung dalam hal ini membuat penggunaan konservatisme semakin meluas dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar beban pajak yang harus disetor ke negara. Untuk menghindari pembayaran pajak yang besar, perusahaan cenderung melaporkan laba yang lebih rendah dengan memilih akuntansi konservatif. Dalam penelitian ini pengaruh insentif pajak terhadap konservatisme terkait dengan adanya kecenderungan atas pemberlakuan penurunan tarif pajak yang memungkinkan manajer perusahaan untuk berlaku konservatif terhadap laporan keuangannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

9. Faktor-Faktor Nonpajak dan Konservatisme

Faktor-Faktor nonpajak yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. *Earnings Pressure*

Menurut Yin dan Cheng (2004) dan Guenther (1994) dalam Subagyo dan Oktavia (2010) insentif pajak mengimplikasikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bahwa perusahaan akan memilih metode akuntansi untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Pada perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak dapat dikurangi oleh *earnings pressure* guna meningkatkan laba akuntansi.

b. Tingkat Utang (*Leverage*)

Sejumlah studi telah mengemukakan bahwa ukuran perusahaan akan berpengaruh pada kebijakan utang perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak dana yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Salah satu sumbernya adalah utang (Solihah dan Taswan, 2002). *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman/kreditor. Kreditor memiliki klaim/kepentingan atas aktiva perusahaan dan semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula klaim kreditor atas aktiva perusahaan. Nilai aktiva bersih dalam laporan keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Pada dasarnya, kreditor menginginkan jumlah aktiva perusahaan yang memadai agar tidak menanggung kerugian dalam pembayaran pinjaman. Dengan adanya klaim ini maka manajer tidak dapat seenaknya memanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki perusahaan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan bahwa kreditor akan meminta manajer untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pelaporan akuntansi secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya (Lo, 2005).

Dalam konteks penurunan tarif pajak, keputusan untuk melakukan konservatisme akuntansi sangat erat kaitannya dengan tingkat utang perusahaan. Perusahaan cenderung meningkatkan utang yang berakibat meningkatnya bunga pinjaman dimana dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar lebih kecil. Jika laba perusahaan kecil dan utang perusahaan besar maka perusahaan cenderung melakukan konservatisme dengan menurunkan utang perusahaan untuk menarik investor. Jadi, jika perusahaan ingin meningkatkan labanya maka manajemen akan menurunkan utangnya untuk memperkecil biaya bunga pinjaman. Sebaliknya, jika perusahaan ingin menurunkan labanya maka manajemen akan menaikkan utang untuk mendapatkan biaya bunga pinjaman. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

c. *Earning Bath*

Menurut Chaney et al. (1995) dalam Subagyo dan Oktavia (2010) menyatakan bahwa apabila laba yang diperoleh oleh perusahaan rendah (di bawah target), maka manajer cenderung melakukan “*big bath*”. *Big bath* dilakukan saat perusahaan mengalami kemunduran kinerja atau saat terjadi peristiwa yang tidak terjadi setiap harinya atau luar biasa. Diharapkan bahwa dengan melakukan konservatisme akuntansi sebagai suatu respon atas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penurunan tarif pajak berhubungan dengan peringkat laba perusahaan di suatu sektor industri. *Big bath* juga sering disebut sebagai *taking a bath*. *Taking a bath* umumnya terjadi pada saat terjadi reorganisasi seperti pergantian CEO. *Taking a bath* dilakukan manajemen dengan cara mengakui dan membebankan biaya-biaya masa akan datang dan mengakui kerugian periode berjalan sehingga dapat mengakibatkan kenaikan laba periode berjalan atau laba pada periode berikutnya menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

Earnings bath dilakukan dengan menggeser laba pada periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang labanya lebih rendah guna meningkatkan laba. Apabila pada periode berjalan memiliki laba yang rendah maka perusahaan cenderung menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan untuk meningkatkan laba periode berjalan yang rendah dan sebaliknya apabila laba periode berjalan tinggi maka perusahaan cenderung menggeser laba periode berjalan ke periode mendatang untuk menjaga agar laba tahun mendatang dapat mencapai target yang diharapkan (Slamet dan Wijayanti, 2012: 5).

d. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh utang sehingga *size* yang besar memudahkan perusahaan dalam masalah pendanaan. Perusahaan besar memiliki

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan atas sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka inginkan misalnya dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Diduga bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon atas penurunan tarif pajak penghasilan.

Perusahaan-perusahaan kecil tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman (utang) dari bank (kreditur). Pihak bank akan membuat prediksi tentang kemampuan perusahaan-perusahaan kecil untuk membayar utang yang didasarkan atas likuiditas dan kontinuitas prospek profitabilitas. Hal ini berbeda dengan perusahaan besar, yang dapat dengan mudah masuk ke pasar modal karena semakin besar ukuran perusahaan biasanya semakin besar kepercayaan kreditur untuk memberikan pinjaman. Hal ini berarti perusahaan besar umumnya memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan melalui pasar modal. Kemudahan ini ditangkap sebagai informasi yang baik. Dengan kata lain, *size* yang besar dan tumbuh dapat merefleksikan tingkat profit di masa mendatang (Soliha dan Taswan, 2002).

Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu (Ardi dan Lana, 2007: 54). Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mewakili seberapa besar ukuran tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat. Dari ketiga variabel tersebut, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Ardi dan Lana, 2007: 54).

Menurut hipotesis *political cost (ceteris paribus)* Watts dan Zimmerman (1986: 200-221) dalam Wicaksono (2012) semakin besar kos politik dihadapi perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menanggukhan laba yang dilaporkan dari perioda kini ke perioda-perioda yang akan datang. Hipotesis *political cost* ini berkaitan dengan ukuran perusahaan, jika perusahaan besar adalah juga sangat profitabel, maka akan meningkatkan kos politiknya. Jika dikaitkan dengan dorongan manajer untuk menunda pembayaran pajaknya maka manajer lebih mungkin memilih akuntansi yang lebih konservatif.

e. *Growth Opportunities*

Pada perusahaan yang menggunakan prinsip konservatif terdapat cadangan tersembunyi yang digunakan untuk investasi sehingga perusahaan yang konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Pertumbuhan ini akan direspon positif oleh investor sehingga nilai pasar perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konservatif lebih besar dari nilai bukunya sehingga akan tercipta *goodwill*. Pasar menilai positif atas investasi yang dilakukan perusahaan karena dari investasi yang dilakukan saat ini diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus kas di masa depan (Widya, 2005). Keadaan ini dapat memperlihatkan perusahaan yang selalu tumbuh karena aset yang selalu bertambah.

Peluang tumbuh akan tercermin dalam tingginya potensi laba suatu perusahaan. Hal ini dapat memperbesar biaya dan resiko politik yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang tumbuh cenderung melaporkan labanya secara konservatif agar dapat mengurangi biaya dan resiko politik yang tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi perhatian yang berlebihan dari regulator dan analis sekuritas. Saputro dan Setiawati (2004) dalam Fatmariani (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga memiliki motivasi untuk meminimalkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dibaca oleh pihak regulator dan pihak lain sebagai tingkat laba yang terlalu tinggi dan memicu tuntutan tinggi bagi perusahaan atau bahkan menimbulkan kecurigaan adanya monopoli.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Penelitian Terdahulu

1. Judul : *The Influence of Tax Costs on Accounting Conservatism*
Nama Peneliti : Kim Boyoung dan Jung Kooyul
Tahun Data : 1997 – 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Industri	: KIS-FAS <i>database</i> (kecuali perusahaan <i>non-financial</i>)
Variabel Penelitian	: <i>Conditional conservatism, unconditional conservatism</i> , dan <i>marginal tax rate</i>
Kesimpulan	: Hasil penelitian yang telah dicapai membuktikan bahwa perpajakan merupakan faktor yang menentukan konservatisme laporan keuangan di Korea. Perusahaan dengan tingkat pajak marjinal yang tinggi menggunakan tingkat <i>unconditional conservatism</i> yang lebih tinggi.
2. Judul	: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Akuntansi Konservatif
Nama Peneliti	: Widya
Tahun Data	: 1995 – 2002
Industri	: Manufaktur yang terdaftar di BEJ
Variabel Penelitian	:Konservatisme, struktur kepemilikan, kontrak utang, <i>political cost, growth</i>
Kesimpulan	:Struktur kepemilikan perusahaan, <i>political cost</i> , dan <i>growth</i> berpengaruh positif terhadap pilihan perusahaan akan akuntansi yang konservatif sedangkan proksi yang paling sesuai dengan model asumsian adalah <i>net asset measures</i> .
3. Judul	: Konservatisme Akuntansi, <i>Value Relevance</i> , dan

Discretionary Accruals : Implikasi Empiris Model
Feltham-Ohlson (1996)

Nama Peneliti : Sekar Mayangsari dan Wilopo
Tahun Data : 1990 – 1999
Industri : Manufaktur yang terdaftar di BEJ
Variabel Penelitian : Konservatisme, *discretionary accruals*, *non-discretionary accruals*, *bonus*, *leverage*, *size*, nilai pasar perusahaan
Kesimpulan : Konservatisme memiliki *value relevance*. Interaksi antara *discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba dengan ketiga hipotesis teori akuntansi positif baik secara individual maupun bersama-sama berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sedangkan interaksi *discretionary accruals* dengan konservatisme tidak berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.

4. Judul : Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya
Nama Peneliti : Cynthia Sari dan Desi Adhariani
Tahun Data : 2005-2007
Industri : Perusahaan yang terdaftar di BEI
Variabel Penelitian : *Debt covenant hypothesis*, ukuran perusahaan, resiko perusahaan, intensitas modal, rasio konsentrasi industri

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- Kesimpulan : *Size, ratio* dan NOA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme perusahaan. Hal tersebut membuktikan teori *size hypothesis* dalam pengukuran konservatisme sedangkan *debt* tidak signifikan terhadap konservatisme.
5. Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi
- Nama Peneliti : Resti
- Tahun Data : 2008 - 2010
- Industri : Manufaktur yang terdaftar di BEI
- Variabel Penelitian : Konservatisme akuntansi, risiko litigasi, pajak, kontrak utang, struktur kepemilikan, dan *growth opportunities*
- Kesimpulan : Risiko litigasi, pajak, struktur kepemilikan, dan *growth opportunities* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sedangkan kontrak utang tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
6. Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur di BEI
- Nama Peneliti : Calvin Oktomegah
- Tahun Data : 2008 – 2010
- Industri : Manufaktur yang terdaftar di BEI



Variabel Penelitian : Konservatisme akuntansi, rasio *leverage*, struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan

Kesimpulan : Faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme adalah *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*) sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi penerapan konservatisme adalah struktur kepemilikan manajerial.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Kerangka Pemikiran

Informasi akuntansi merupakan pengetahuan mengenai data akuntansi yang penting dipahami oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sumber utama informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Laba dalam laporan keuangan mempunyai tingkat konservatisme yang berbeda. Konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Prinsip konservatisme telah lama digunakan dalam akuntansi dan merupakan konvensi laporan keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut sebagai prinsip akuntansi yang dominan. Prinsip konservatisme ini yang menjadi pertimbangan dalam akuntansi dan laporan keuangan karena aktivitas perusahaan yang selalu dilingkupi ketidakpastian. Kontroversi mengenai penggunaan konservatisme akuntansi menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diteliti.

1. Pengaruh insentif pajak terhadap konservatisme akuntansi

Dalam Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008, terdapat penurunan dalam tarif PPh bagi wajib pajak badan. Penurunan tarif PPh ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penetapan tarif tunggal ini dalam rangka menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *international best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham. Dengan demikian, pada tahun 2009 tarif pajak perusahaan yang *go public* adalah sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. Wijaya dan Martani (2011: 2) menyebutkan bahwa dengan perubahan tarif pajak yang semakin kecil ini dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya dengan menerapkan akuntansi yang konservatif untuk memperkecil laba kena pajaknya sehingga beban pajak perusahaan di tahun sebelum diberlakukan UU PPh yang baru juga semakin kecil. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Wijaya dan Martani, 2011: 14). Penelitian ini secara khusus menggunakan periode pengamatan dua tahun sebelum dan sesudah berlakunya perubahan undang-undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan yang didukung dengan adanya penurunan tarif PPh badan pada periode 2009 dan 2010 untuk mengetahui apakah dengan adanya pemberlakuan undang-undang tersebut memicu praktik konservatisme sebelum diberlakukannya tarif yang baru. Dengan demikian, insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

2. Pengaruh *earnings pressure* terhadap konservatisme akuntansi

Insentif pajak mengimplikasikan bahwa perusahaan akan memilih metode akuntansi untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Pada perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak dapat dikurangi oleh *earnings pressure* guna meningkatkan laba akuntansi. Dengan demikian, *earnings pressure* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

3. Pengaruh tingkat utang (*leverage*) terhadap konservatisme akuntansi

Berdasarkan penelitian Wijaya dan Martiani (2011) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas utang. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat utangnya kepada tingkat rata-rata utangnya dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh pajak, yaitu faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan utangnya. Perusahaan meningkatkan utangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam hal ini, utang bertindak sebagai *tax shields* karena dapat mengurangi pajak yang harus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk pembayaran bunga kepada kreditor.

Lo (2005) menemukan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Pada perusahaan yang memiliki utang relatif tinggi, kreditor mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Widanaputra (2007) diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi dan signifikan secara statistis pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan kata lain, semakin tinggi resiko perusahaan yang diaplikasikan dalam kontrak utangnya, seharusnya manajemen perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan sangat berhati-hati (konservatif) di dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak selama berlangsungnya kegiatan operasi. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan laba perusahaan yang *understatement*. Sementara itu, utang memberikan insentif bagi *agent* dan *principal* untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai perusahaan melalui keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Proporsi utang yang besar akan menyebabkan timbulnya tuntutan yang semakin mempengaruhi keputusan dalam penggunaan prinsip pencatatan perusahaan. Semakin banyak utang perusahaan juga akan menyebabkan pelunasan yang harus dilakukan oleh perusahaan semakin besar yang nantinya akan meningkatkan resiko. Oleh karena itu, dengan keadaan sedemikian rupa maka akan muncul tuntutan untuk melakukan pencatatan yang konservatif. Oleh karena itu, semakin

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi tingkat utang (*leverage*) semakin konservatif pelaporan yang digunakan. Dengan demikian, tingkat utang (*leverage*) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

4. Pengaruh *earnings bath* terhadap konservatisme akuntansi

Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martiani (2011) menyatakan bahwa jika laba perusahaan kecil, maka manajer tidak akan berusaha meningkatkan total akrualnya, namun akan memperkecil total akrualnya agar mendapatkan kompensasi di masa mendatang. Hal ini disebut sebagai *earnings bath*. Dalam penelitian ini, perusahaan sampel dengan peringkat ROE 20% terbawah cenderung melakukan konservatisme selama tahun berjalan. Dengan demikian, *earnings bath* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

5. Pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap konservatisme akuntansi

Perusahaan yang berukuran besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan profit yang tinggi daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar memiliki masalah yang lebih banyak dan kemungkinan resiko yang lebih tinggi. Pada umumnya, perusahaan yang berukuran besar lebih mendapat pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dibanding dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar dan telah dikenal masyarakat cenderung akan lebih berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangannya. Menurut Lo (2005 : 402) perusahaan besar yang memiliki nilai laba yang tinggi dapat mendorong pemerintah untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada perusahaan. Untuk mendapatkan nilai pajak yang kecil, perusahaan dapat menggeser laba perusahaan sebagai respon atas perubahan tarif pajak untuk menghasilkan beban pajak yang diinginkan. Menurut Watts dan Zimmerman (2003) dalam Wijaya dan Martani (2011), perusahaan yang lebih besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung konservatif dengan melaporkan nilai laba yang rendah. Dengan demikian, ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

6. Pengaruh *growth opportunities* terhadap konservatisme akuntansi

Peluang tumbuh akan tercermin dalam tingginya potensi laba suatu perusahaan. Hal ini dapat memperbesar biaya dan risiko politik yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang tumbuh cenderung melaporkan labanya secara konservatif agar dapat mengurangi biaya dan risiko politik yang tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi perhatian yang berlebihan dari regulator dan analis sekuritas. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga memiliki motivasi untuk meminimalkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dibaca oleh pihak regulator dan pihak lain sebagai tingkat laba yang terlalu tinggi dan memicu tuntutan tinggi bagi perusahaan atau bahkan menimbulkan kecurigaan adanya monopoli (Resti, 2012: 25-26).

Sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian Widya (2005) bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk memilih akuntansi yang konservatif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

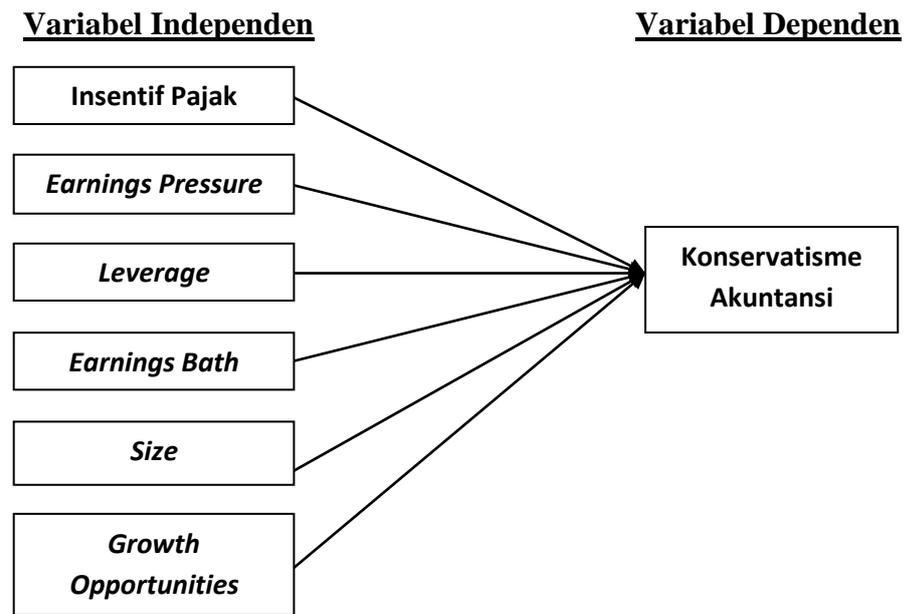
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Oleh karena itu, penelitian ini memprediksi perusahaan yang tumbuh berpengaruh terhadap akuntansi konservatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, disajikan model teoritikal sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Teoritikal



Sumber: Telaah pustaka

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

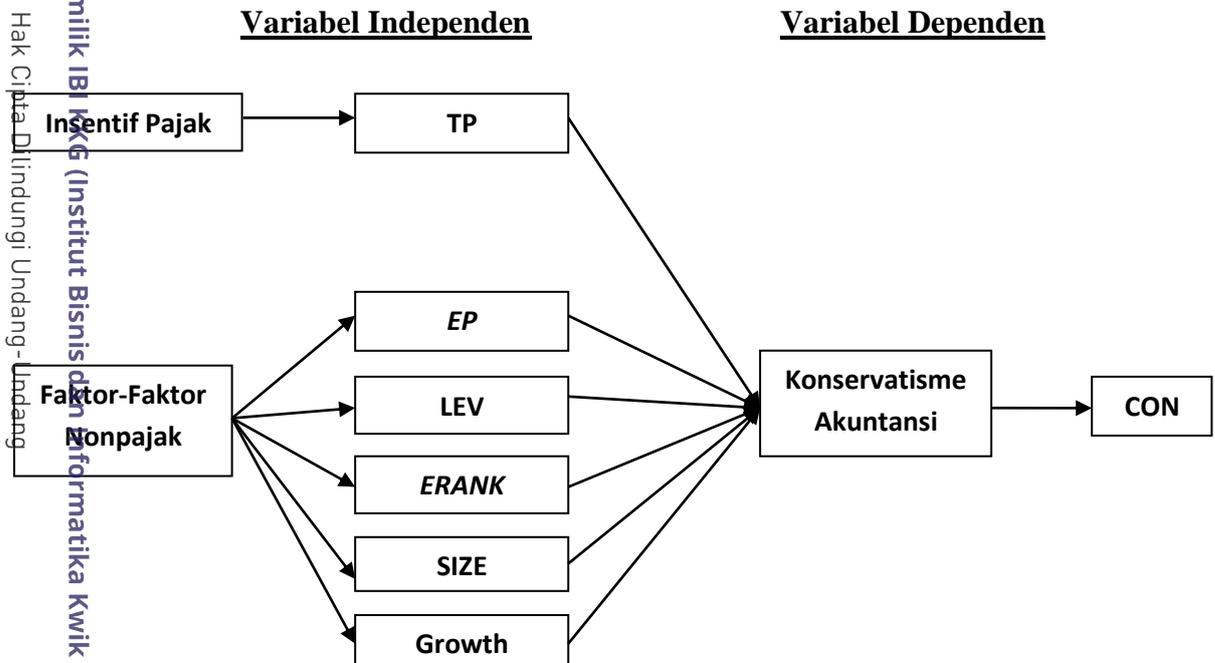
E Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
- H2: *Earnings pressure* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
- H3: Tingkat utang (*leverage*) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
- H4: *Earnings bath* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
- H5: Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
- H6: *Growth opportunities* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

Rangkaian hipotesis di atas disajikan dalam model empirik sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Empirik Penelitian



Sumber: Model yang dikembangkan pada penelitian ini

Keterangan Gambar:

- CON = Konservatisme
- TP = *Taxplan*
- EP = *Earnings pressure*
- LEV = *Leverage*
- ERANK = *Earnings bath* yang diukur dengan tingkat ROE perusahaan
- SIZE = Ukuran perusahaan
- Growth = *Growth opportunities* yang diukur dengan *market to book value of equity*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.